

# DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



RENCANA KERJA (RENJA)

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja merupakan acuan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD dan RENSTRA. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Tahun Undang-Undang No. 25 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci Mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RKP 2025 dan RKPD 2025 yang berisi rincian mengenai program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya.

Akhirnya kami berharap kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadikan dokumen ini sebagai Rencana didalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun 2025, dan semoga memberikan manfaat.

Palu, September 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH

### **DAFTAR ISI**

BAB I		
PENDA	AHULUAN	4
1.1 L	atar Belakang	4
1.2 L	andasan Hukum	5
1.3 N	Maksud dan Tujuan	9
1.4 S	Sistematika Penulisan	10
BAB II		
	JASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH JUMNYA	
	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan stra	_
2.2 A	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	25
2.3 Is	su-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	27
2.4 R	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
BAB II	I	
TUJUA	AN, SASARAN	43
3.1 T	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 T	Րujuan dan Sasaran Renja	45
3.3 P	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	47
BAB IV	<b>J</b>	
RENCA	ANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN	2025.49
	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Pera ah	
BAB V		
PENUT	TUP	53
5.1.	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian	53
5.2.	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	54
5.3	Rencana tindak lanjut	58

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dimana gambaran Upaya pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasararan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya pembangunan merupakan unsur perencanaan yang mempengaruhi kelancaran serta pencapaian target yang akan direncanakan.

Perencanaan pembangunan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah akan tetap memegang peranan penting didalam proses pembangunan nasional maupun daerah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2025 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Rancangan Awal Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam maksud tersebut diatas. pemenuhan maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Mernteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga mengacu pada Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peratruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi.
  Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90).
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
- 19. dengan Peratruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
- 20. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
- 21. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126):

26. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulawesi Tengah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dimaksudkan untuk merumuskan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sesuai dengan Rencana Strategis dan RKPD, sehingga lebih memantapkan Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.serta memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik Pemerintah, maupun masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana secara berkesinambungan. Diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

#### Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Renja menjadi acuan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Renja sebagai dokumen yang merumuskan Program-program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi

Tengah untuk tahun 2025, mengacu pada Renstra P2KB 2021-2026 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan kaidah Penyusunan Renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No. 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

#### BAB III TUJUAN, SASARAN,

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

#### BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 5.3 Rencana tindak lanjut

#### BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi sebagai sebagai salah satu metode yang berfungsi unutk peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui apakah kinerja utama dari Perangkat Daerah telah tercapai, termasuk didalamya meliputi program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dan 2024, berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, yakni untuk mengetahui:

- 1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi/ memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian

#### Renstra.

1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024

- 2. Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 terdiri dari 4 Program, 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:
- 3. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 didukung oleh pendanaan yang digunakan secara efektif dan efisien. Adapun Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung dicapai tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16.013.633.462 dari jumlah pagu total Rp. 16.993.446.854 dengan tingkat capaian 94.23% dari Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung.
- 4. Alokasi Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 berdasarkan DPPA-SKPD adalah sebesar 16.993.446.854 terdiri dari:
  - a) Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 6.682.422.422.397,67
  - b) Belanja Langsung

Rp. 10.311.024.456.00

5. Rincian realisasi belanja 2024 diuraikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.993.446.854.67	16.013.633.462	94,23%
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.044.650	27.044.650	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.044.650	27.044.650	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	982.760.000	980.135.499	99,73
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.682.422.398.67	5.765.292.333	86,28
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	930.700.000	928.075.499	99,72
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.060.000	52.060.000	100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.520.530	255.201.000	99,87
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	255.520.530	255.201.000	99,87
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.731.291.288	3.726.318.260	99,87
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	522.861.088	522.726.750	99,97
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	412.526.750	412.525.750	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.795.903.450	2.791.065.760	99,83
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.571.012	283.454.300	99,96
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	283.571.012	283.454.300	99,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.888.966	539.705.716	99,97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	539.888.966	539.705.716	99.97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.448.409.772	1.429.835.093	98,72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.550.000	317.484.031	99,98
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.240.000	46.240.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.084.619.772	1.066.111.062	98,29
Program Pengendalian Penduduk	828.426.950	821.057.435	99,11
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daera Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	423.763.800	422.365.965	99,67
Advokasi dan Sosialisasi GDPK	303.153.800	303.012.965	99,95

	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi	120.610.000	119.352.000	98,96
	Program KKBPK dan Sektor Lain Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	404.663.150	398.692.470	98,52
	Cakupan Daerah Provinsi  Pemetaan Program  Kependudukan dan Keluarga  Berencana Pembangunan  Keluarga (Bangga Kencana)	321.489.150	315.518.470	98,52
	Penyusunan profil Program kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	83.174.000	83.174.000	100
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	913.262.506	910.838.250	99,73
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	278.383.054	277.092.854	99,54
	Pengembangan Strategi Operasional promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi sesuai kearifan budaya lokal	97.606.704	97.318.554	99,70
	Fasilitasi kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja dan pelaksanaan advoaksi, promosi dan KIE program Banggan Kencana	151.637.350	150.635.300	99,34
	Pengembangan Media Massa cetak dan Elektronik serta media luar ruang untuk Advokasi promosi dan KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	29.139.000	29.139.000	100
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	634.879.452	633.745.396	99,82
	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	634.879.452	633.745.396	99,82
		-	-	

4	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	1.300.848.782	1.274.750.926	97,99
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	487.918.900	484.287.400	99,26
	Penyediaan Kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhah 1000 hari pertama kelahiran (HPK)	71.245.900	70.037.200	98,30
	Pengembangan dan perbanyakan materi substansi pusat informasi konseling remaja (PIK R) media promosi, alat peramainan edukatif Remaja dan sarana prasarana lainya yang dibutuhkan	32.000.000	32.000.000	100
	Sosialisasi dan pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	208.189.700	202.552.614	97,29
	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana pusat informasi konseling Remaja PIK R	195.513.550	190.736.002	97,56
	Advokasi Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga ( Ibangga) Tingkat Provinsi dan Kab/ Kota	48.280.200	44.538.435	92,25
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	257.700.532	250.599.275	97,24
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	257.700.532	250.599.275	97,24
	TOTAL ANGGARAN	16.993.446.854,67	16.013.633.462	94,23%

Tabel. 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN 2023

URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR PROGRAM	TA	ARGET	ANGGARAN REALISASI CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
PEMERITAH DAERAH DAN	(OUTCOME) /	KI	NERJA	APBD	DAN ANGGARAN RKPD 2023		KINERJA DAN ANGGARAN
PROGRAM/KEGIATAN/SUB	KEGIATAN			PERUBAHAN	PERSEN	TASE CAPAIAN KINERJA	RKPD 2023
KEGIATA	(OUTPUT)/SUBKEGIAT			2023			
	AN (SUB OUTPUT)						
		К		RP	К	RP	
URUSAN PEMERINTAHAN				18.720.642.625		17.693.374.511	94,51%
BIDANG PENGENDALIAN							
PENDUDUK DAN KELUARGA							
BERENCANA							
PROGRAM PENUNJANG	Indeks Reformasi	64	%				
URUSAN PEMERINTAHAN	Birokrasi			7.582.121.863			
DAERAH PROVINSI	PerangkatDaerah						
Perencanaan, Penganggaran,		100	%	29.965.650	100%	29.965.650	99.30%
dan Evaluasi Kinerja Perangkat							
Daerah							
Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen	1	Dokum	1.916.900	1	1.916.900	100%
Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan,		en		Doku		
	Penganggaran, dan				men		
	Evaluasi Kinerja						
	Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen RKA	1	Dokum	14.999.850	1	14.999.850	100
Dokumen RKA-SKPD			en		Doku		
					men		
Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen DPA		Dokum	3.000.000	2	3.000.000	100
DPA-SKPD		2	en		Doku		
					men		

T 1: 1 D			ļ.,	10.040.000		12.242.222	100
Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen		Lapora	10.048.900	1	10.048.900	100
Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan Capaian	1	n		Lapora		
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja				n		
Administrasi Keuangan	Jumlah laporan	100	%	7.799.843.139	100%	6.862.574.798	87.98%
Perangkat Daerah	pertanggungjawaban						
	keuangan						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang	95	Orang	6.835.293.139	95	5.934.568.798	86.82%
ASN	Menerima Gaji dan						
	Tunjangan						
Penyediaan Administrasi	Jumlah dokumen hasil			919.550.000	2	883.006.000	96.03%
Pelaksanaan Tugas ASN	penyediaan	2	Dokum		Doku		
	Administrasi		en		men		
	pelaksanaan tugas ASN						
Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan			45.000.000	1	45.000.000	100%
Laporan Keuangan Akhir Tahun	Keuangan Akhir Tahun				Lapora		
SKPD	SKPD dan Laporan				n		
	Hasil Koordinasi	1	Lapora				
	Penyusunan Laporan		n				
	Keuangan Akhir Tahun						
	SKPD						
Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan	100	0.4	337.639.100	100 %	337.429.600	99.94%
Perangkat Daerah	Masyarakat	100	%				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Paket Pakaian			229.586.100	2	229.469.600	99.98%
Atribut Kelengkapannya	Dinas Beserta Atribut	2	paket		Paket		
	Kelengkapan						
Monitoring,evaluasi, dan	Jumlah dokumen			53.035.000	1	52.960.000	99.89%
Penilaian Kinerja Pegawai	monitoring, evaluasi		Dokum		Doku		
_	dan penilaian kinerja	1	en		men		
	pegawai						
Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah org yang			55.000.000	4	55.000.000	100%
pengaturan	mengikuti Bimbingan	4	Orang		Orang		
Perundang-undangan.	Teknis Implementasi				1 [		

	pengaturan						
	Perundang-undangan.						
Administrasi Umum Perangkat	Jumlah dokumen			3.685.619.608	100%	3.683.909.147	99.95%
Daerah	ketatausahaan dan	100	%				
	kepegawaian						
Penyediaan Peralatan	jumlah paket peralatan			670.814.594	1	670.536.900	99.96%
dan Perlengkapan Kantor	dan perlengkapan	1	paket		Paket		
	kantor yang disediakan						
Penyediaan Bahan Logistik	jumlah paket bahan			1.117.962.564	3	1.116.730.000	99.89%
Kantor	logistic kantor yang di	3	paket		Paket		
	sediakan						
Penyediaan Barang Cetakan dan	jumlah paket Barang			78.646.600	2	78.646.600	100%
Penggandaan	cetakan dan		D 1		Paket		
	penggandaan yang di	2	Paket				
	sediakan						
Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan			1.818.195.850	13	1.817.995.647	99.99%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat	13	laporan		Lapora		
	Koordinasi dan	13	Тароган		n		
	Konsultasi SKPD						
Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan			1.522.700.000	100%	1.511.499.000	99.26%
Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Barang						
Daerah	Milik Daerah	100	%				
	Penunjang Urusan						
	Pemerintah Daerah						
Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan dan			1.522.700.000	3 Unit	1.060.799.000	69.67%
Pendukung Gedung Kantor atau	pemeliharaan barang						
Bangunan Lainnya	milik negara	3	unit				
Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah laporan			645.575.505	100%	645.557.512	99.53%
Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa						
	Penunjang Urusan						
	Pemerintahan Daerah	100	%				

Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah penyediaan			470.005.500	1	466.994.512	99.39%
Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi,				Lapora		
	Sumber Daya Air dan		Lapora		n		
	Listrik	1	n				
	Jumlah laporan			175.570.005	1	175.563.000	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan	penyediaan jasa				Lapora		
Umum Kantor	pelayanan umum		Lapora		n		
	kantor yg disediakan	1	n				
PROGRAM PENGENDALIAN	Jumlah Kab/Kota			1.195.602.550	1	1.177.076.788	98.45%
PENDUDUK	yang menyusun GDPK		Kab/K		Kab/K		
		1	ota		ota		
Pemaduan dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen			562.811.800	2	552.272.524	98.13%
Kebijakan Pemerintah Pusat	Pemaduan dan Sinkronisasi				Doku		
dengan Pemerintah Daerah	Kebijakan Pusat				men		
Provinsi dalam rangka	dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam						
Pengendalian Kuantitas	rangka Pengendalian						
Penduduk	Kuantitas Penduduk	2	Dok				
Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan			345.517.600	1	342.708.494	99.19%
	Pelaksanaan Advokasi		Lapora		Lapora		
	dan Sosialisasi GDPK	1	n		n		
Advokasi dan Sosialisasi	Jumlah dokumen hasil			217.294.200	1	209.564.030	96.44%
pembentukan Rumah Data	advokasi dan sosialisasi pembentukan Rumah				Doku		
Kependudukan di kampung KB	data kependudukan di				men		
untuk memperkuat Integrasi	kampung Kb .		dokume				
Program KKBPK dan sector lain.		1	n				
Pemetaan Perkiraan	Jumlah Dokumen			632.790.750	3 Dok	624.804.264	98.74%
Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian						
Cakupan Daerah Provinsi	Penduduk Cakupan						
	Daerah Provinsi	3	Dok				
Pemetaan program	Jumlah dokumen hasil			238.000.000	1	232.034.454	97.49%
kependudukan, Keluarga	Pemetaan program		dokume		Doku		
kependudukan, keluarga	kependudukan,						

Berencana dan Pembanguanan	dan Pembanguanan						
Keluarga	Keluarga						
Penyusunan Profil	Jumlah dokumen hasil			229.051.250	1	297.030.310	99.32
kependudukan, Keluarga	Penyusunan Profil kependudukan,				dokum		
Berencana dan Pembangunan	Keluarga Berencana		dokume		en		
Keluarga	dan Pembangunan Keluarga	1	n				
Penyediaan Dukungan	Jumlah Dokumen			95.739.500	1	95.739.500	100%
Penyelenggaraan Pendataan dan	Hasil Dukungan Penyelenggaraan				dokum		
Pemutakhiran Data Keluarga	Pendataan dan		Dokum		en		
	Pemutakhiran Data Keluarga	1	en				
PROGRAM PEMBINAAN	Rasio Akseptor KB	100	%	1.029.056.300	100%	1.019.633.600	99.08%
KELUARGA BERENCANA (KB)	_						
Pengembangan Desain	Rasio Akseptor KB			541.266.900	4	537.910.200	99.38%
Program, Pengelolaan dan	_				Doku		
Pelaksanaan Advokasi,					men		
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian							
Penduduk dan Keluarga							
Berencana (KB) Sesuai			Dokum				
Kearifan Budaya Lokal		4	en				
Penggunaan Media massa cetak	Jumlah laporan media	77	laporan	115.281.850	77	115.103.550	99.85%
dan elektronik serta media luar	massa cetak dan	' '	laporan	113.201.000	Lapora	110.100.000	JJ.6370
ruang untuk Advokasi, Promosi	elektronik serta media				1 1		
dan KIE	luar ruang untuk Advokasi, Promosi dan				n		
	KIE						
<ul> <li>Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra</li> </ul>	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama	14	Dokum	137.849.150	14	134.670.750	97.69%
Kerja dalam Pelaksanaan	dengan Stakeholders		en		Doku		
Advokasi, Promosi dan KIE	dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi,				men		
Program KKBPK	Promosi dan KIE						
	Program Pembangunan						
	Keluarga, Kependudukan, dan						
	Keluarga Berencana						
	(Bangga Kencana)						

Pengembangan strategi	Jumlah dokumen hasil	14	dokume	158.297.700	14	158.297.700	100%
Operasional promosi dan	pengembangan strategi Operasional promosi		n		Doku		
konseling kesehatan Reproduksi sesuai dengan	dan konseling				men		
kearifan budaya lokal	kesehatan Reproduksi						
nearman sadaya lonar	sesuai dengan kearifan budaya lokal						
Pembinaan promosi dan	Jumlah dokumen/	14	Lapora	129.838.200	14	129.838.200	100%
konseling kesehatan	laporan		n		Doku		
Reproduksi					men		
Pemberdayaan dan     Peningkatan Peran serta     Organisasi Kemasyarakatan     Tingkat Daerah Provinsi     dalam Pengelolaan Pelayanan     dan Pembinaan Kesertaan     Ber- KB	Angka Pemakaian Kontrasepsi / mCPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49(Persen)	100	%	487.789.400	100%	481.723.400	98.76%
Pengembangan Strategi	Jumlah Dokumen Hasil	77	Dokum	299.519.750	77	297.326.710	99.27%
Operasional dalam rangka	Pengembangan Strategi Operasional dalam		en		Doku		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	Rangka Pemberdayaan				men		
Kemasyarakatan dalam	dan Peningkatan Peran Serta Organisasi						
Pelayanan dan Pembinaan	Kemasyarakatan Dalam						
Kesertaan Ber-KB	Pelayanan dan						
	Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
	Jumlah Organisasi	77	Organis	188.269.650	77	184.396.690	97.94%
Peningkatan Peran Serta dan	yang Mengikuti Peningkatan Peran		asi		Organi		
Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam	Serta dan Kerja Sama				sasi		
Pelayanan dan Pembinaan	Organisasi						
Kesertaan Ber-KB	KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan						
	Pembinaan Kesertaan						
	Ber-KB						
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Presentase Capaian Pemberdayaan dan	100	%	2.078.568.800	100%	2.033.041.207	97.81%
DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan Keluarga						
MDDOARGA GEOARTERA (NS)	Sejahtera						
· Pengelolaan Pelaksanaan	Jumlah organisasi/	100	%	1.592.996.400	100%	1.563.284.275	98.13%
Desain Program Pembangunan	Dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain						
Keluarga Melalui Pembinaan	Program						
	Pembangunan						

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
<ul> <li>Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ul>	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dokum en	175.796.000	1 Doku men	160.597.025	91.35%
<ul> <li>Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ul>	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	13	Dokum en	211.744.850	13 Doku men	744.850.000	100%
<ul> <li>Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana</li> </ul>	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	500	Orang/ kelomp ok	279.086.000	500 orang	274.386.000	98.32%
<ul> <li>Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja</li> </ul>	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1	Lapora n	156.765.900	1 Lapora n	156.365.900	99.74%
Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Inforamsi dan Konseling Remaja ( PIK/R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	50	Organis asi	48.512.350	50 Organi sasi	48.512.350	100%
Sub. Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	Dokum en	41.190.000	1 Doku men	41.190.000	100%
<ul> <li>Sub. Kegiatan Advokasi, ,</li> <li>Sosialisasi, dan Promosi IPK</li> </ul>	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, , Sosialisasi, dan Promosi IPK	13	Lapora n	545.370.050	13 Lapora n	51.920.050	93.77%

Sub. Kegiatan Pelaksanaan     Fasilitasi Pembimbingan,     Pengembangan dan Penguatan     Penyiapan Pengasuhan 1000     HPK	jumlah kelompok masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan, bimbingan 1000 HPK	13	Dokum en	48.539.950	13 Doku men	44.839.950	92.38%
Sub Kegiatan Penyediaan     Sarana penyiapan Pengasuhan     1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1	unit	448.547.000	1 Unit	448.283.850	99.94%
Pemberdayaan dan     Peningkatan Peran serta     Organisasi Kemasyarakatan     Tingkat Daerah Provinsi     dalam Pembangunan Keluarga     Melalui Pembinaan Ketahanan     dan Kesejahteraan Keluarga		100	%	485.572.400	100%	469.756.932	96.74%
Sub. Kegiatan Pengelola Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera ( PKKS )	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1	Dokum en	88.520.200	1 Doku men	88.520.200	100%
Sub. Kegiatan Penguatan     Pemberdayaan Ekonomi     Keluarga	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	lapora n	81.868.100	1 Lapora n	77.628.100	94.82%
Sosialisasi dan Promosi     Tentang Pemberdayaan     Ekonomi Keluarga dan     Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1	Lapora n	47.201.000	1 Lapora n	44.425.532	94.12%
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	1	Dokum en	240.682.350	1 Doku men	231.882.350	96.34%

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						
Fasilitasi Pengembangan     Program Ketahanan Keluarga di     Kampung KB	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	1	Dokum en	27.300.750	1 Doku men	27.300.750	100%

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut: Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 (Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024).

TABEL. 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2024

N o	Sasaran Strategis			TARG		Catatan Analisis								
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya	Nilai Dimensi Indeks	52,47	54,38	52,50	63	61,9	62,5	51,49	51,09	59,99	61,2		Tidak
	Ketentraman,	Pembangunan												Tercapai
	Kebahagiaan dan	Keluarga												
	Kemandiiran													
	Keluarga													
2	Meningkatnya	Angka Fertilitas	2,61	2,60	2,55	2,14	2,23	2,20	2,43	2,32	2,16	2,31		Melampau
	Pengendalian Penduduk dan	Rate ( Total Fertility												i Target
	Kualitas Keluarga	Rate/ TFR)												

3	Meningkatnya	Angka Pemakaian	78,06	78,09	60	61	59,9	60,9	53,83	59,91	67,8	67,72	Melampau
	Angka Prevalensi	Kontrasepsi											i Target
	Contrasepsi	modern/ mCPR bagi											
	Modern (mCPR)	Perempuan											
		Menikah usia 15-49											
		Tahun											
4	Menurunya	Presentase	14,66	14.63	13,98	13,98	13,35	12,90	11,96	6,57	14,6	9,8	Tercapai
	Cakupan PUS yang	Kebutuhan Ber -KB											
	ingin Ber KB tapi	yang tidak											
	tidak terpenuhi	terpenuhi Unmeed											
		Need)											
5	Meningkatnya	Presentase	13,00	13,35	19	23,6	35	35,5	20,1	13,02	21	17,24	Melampau
	Pemakaian Metode	Pemakaian Metode											i Target
	Kontrasepsi	Kontrasepsi Jangka											
	Jangka Panjang	Panjang											
7	Menurunnya angka		,	,		,	' '	' '	48/	36/	33,25/	38/1	Melampau
	Kelahiran Remaja	Remaja umur 15-19	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	000	i Target
	Angka Kelahiran	tahun ( Age Spesifik											
	Remaja umur	Fertility Rate /ASFR											
	15-19 tahun ( Age												
	Spesifik Fertility												
	Rate /ASFR)												

#### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi. Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja perangkat daerah.Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh ketersedian Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana serta pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tidak tersedianya SDM yang mendukung dan sarana prasarana serta tidak terciptanya koordinasi, dan sinkronisasi yang baik akan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sulawesi Tengah. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah ditahun pertama setelah pembentukannya melalui PP No. 18 Tahun 2016 melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Gubernur selaku Kepala Daerah dalam menyusunan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan didukung sumber daya manusia yang kuat dan kapasitas asset/modal yang memadai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah;
- 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 4. Penetapan Rencana kerja Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 6. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana;
- 7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan Kabupaten dan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasaranaPelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas dan fungsi sekretariat, bidang, dan seksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

#### Tugas:

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

#### Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
- b. Penyusunan rencana Program dan Anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian:

- 1. Sub. Bagian Program, Keuangan dan Aset
  - Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum
   Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

# 2. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

#### Tugas:

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan.

#### Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

# 3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

#### Tugas:

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

#### Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan KB;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan keluarga;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Kendala Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan

profesional dalam berbagai pelaksanaan Tupoksi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;

- 2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;
- 3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;
- 4. Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas;

#### Tantangan dan Peluang

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat tantangan dan peluang yang berasal dari lingkungan ekseternal dan lingkungan internal yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah yang secara langsung berdampak bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program OPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

- 1. Bonus demografi; Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
- 2. Pengendalian Angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR Nasional mengalami penurunan dari 2,6 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15- 49 tahun (SP 2010), menjadi 2,41 (SDKI 2017), dan data terakhir menunjukkan pada angka menjadi 2,38 (Survei RPJMN/SKAP 2018). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Sementara TFR Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 mencapai 2,31 dari target 2,14.
- 2. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) di Provinsi Sulawesi Tengah menurun dari 65,2 persen (SKAP 2018) menjadi 54,4 persen (SKAP 2019). Pada Tahun 2024 mCPR Mencapai 67,72 dari target 61, Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, di antaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar pasangan

- usia muda/pasangan millenial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;
- 3. Menurunya Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan Reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu.
- 4. Menurunya Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Sulawesi Tengah dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, unmet need terus mengalami kenaikan yakni pada tahun 2024, posisi unmet need mencapai 9,8 persen dari target 13,98
- 5. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk tahun 2024 sudah melampaui target, sehingga berpengaruh besar pada pencapai penurunan Angka Kelahiran.
- 5. Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting adalah masalah serius yang kini tengah di hadapi oleh banyak Negara, termasuk Indonesia Kondisi ini mengacu pada keterlambatan Pertumbuhan Anak akibat Mallnutrisi yang berkepanjangan, terutama pada usia Balita. (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan

hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif, berdasarkan Data World Health Organization (WHO) Indonesia menjadi salah satu dari 5 Negara terbesar dengan angka Prevalensi Stunting terbesar di dunia.sedangkan menurut hasil Survei status Gizi Indonesia ( SSGI ) Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam 10 Besar Daerah dengan angka Stunting tertinggi di Indonesia.Berdasarkan data yang ada,bahwa tahun 2021 angka Prevalensi Stunting di Sulawesi Tengah berada di angka 29,7 persen .pada tahun 2022 angka Prevalensi stunting menurun menjadi 28,2 persen ,dan pada tahun 2023 turun menjadi 27,2 Persen.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menunjukkan komitmen yang kuat terhadap Indikator Kinerja Dinas pengendalian penduduk dan program KB. penjelasan lebih rinci mengenai indikator Namun, perlu keberhasilan yang akan digunakan. Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 maka kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, Daerah selengkapnya kebutuhan program dan kegiatan dengan target dan pendanaan sebagaimana tabel terlampir:

# Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025

### **TABEL 2.5**

Sasaran	Kode	Program dan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaia n pada Tahun Awal	Progr Kerangka	Kinerja ram dan Pendanaan	Lokasi
Sasaran	noue	Kegiatan	(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Perenc anaan (Tahun 2024)	Target	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	12
URUSAN WAS TIDAK BERK DENGAN PEL DASAR	AITAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						Rp 12.003.087. 643	
Meningkat nya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55.50	70.00	Rp 10,691,849,9 73	Provins i dan 12 Kab
Meningkat nya kualitas Perencanaa n, Pengukura n, Evaluasi dan Pelaporan	2.14.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,75	83.00	Rp 84,420,790	Provins i dan 12 Kab
			Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah				
	2.14.01.1.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang di susun	4 dokumen	4 dokumen	Rp 84,420,790	Provinsi
Meningkat nya Kualitas Administra si Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaia n Tindaklanj ut Hasil	2.14.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Rekomendasi (TLHP)	100%	100%	Rp 7,982,308. 613	Provins i

Pemerikaan (TLHP)							
	2.14.01.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/ 12 bulan	60 Orang	Rp 7,003,208,6 13	Provinsi
	2.14.01.1.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57 Laporan	1 Dokumen	Rp 929,700,00 0	Provinsi
	2.14.01.1.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	Rp 49,400,000	Provinsi
Meningkat nya profesionali sme ASN Perangkat Daerah	2.14.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	100.00	100.00	Rp 315,273,20 0	Provins i
	2.14.01.1.0 5.0002	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	Rp 220,718,70 0	Provinsi
	2.14.01.1.0 5.00010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga n	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga n	0	50 Orang	Rp 65,724,500	Provinsi
	2.14.01.1.0 5.00011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanga n	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga n	0	3 Orang	Rp 28,830,000	Provinsi
Meningkat nya Kematanga n SPBE Perangkat Daerah	2.14.01.1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah		100%	Rp 1,017,133, 745	Provins i dan 12 Kab
	2.14.01.1.0 6.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	3 paket	Rp 169,897,79 5	Provinsi
	2.14.01.1.0 6.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	3 paket	Rp 195,742,55 0	Provinsi
	2.14.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Instansi	13 Laporan	Rp 651,493,40 0	Provinsi dan 12 Kab

Man 2-1 4	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	I			
Menigkatny a Pemanffata n LayananPe ngadaan Barang dan Jasasecara Elektronik perangkat daerah	2.14.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	100	100	Rp 432,018,72 5	Provins i
	2.14.01.1.0 7.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	2 Unit	Rp 22,220,000	Provinsi
	2.14.01.1.0 7.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	17 Unit	Rp 184,483,50 0	Provinsi
	2.14.01.1.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	juMLAH Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan yang di sediakan	0	1 Unit	Rp 225,315,22 5	Provinsi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	2.14.01.1.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah	100	100	Rp 421,384,90 0	Provins i
	2.14.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	Rp 421,384,90 0	Provinsi
Meningkat nya Kualitas pemelihara an barang milik daerah	2.14.01.1.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PersentaseSarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100	100	Rp 439,310,00 0	Provins i
	2.14.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	17 unit	17 Unit	Rp 308,150,00 0	Provinsi
	2.14.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	101 Unit	Rp 76,160,000	Provinsi
	2.14.01.1.0 9.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Pahet	2 Unit	Rp 55,000,000	Provinsi

Terkendali nya Pertumbuh an dan Persebaran Penduduk	2.14.02.1.0	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk		1,4	Rp 430,679,950	12 Kab
Meningkat nya Implemnta si Sekolah Siaga Kependudu kan ( SSK ) di Pendidikan Menengah	2.14.02.1.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalan Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Presentase Kab/Kota yang Menginplementasik an SSK		11.00%	Rp 206,716,650	12 Kab
	2.14.02.10 003	Advokasi dan Sosilasisai GDPK	Jumlah Dokumen Revisi GDPK	-	1 Dokumen	Rp 87,527,700	
			Jumlah Kab/Kota yang tersusun Draft GDPK		5 Kab		Kab/Ko ta
	2.14.02.10 015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan diKampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Nota Kesepahaman terkait pembagian intervensi Pembentukan pengelolaan Kamupng KB dan Rumah data Kependudukan	-	1 Nota	Rp 53,702,100	Provinsi
	2.14.02.10 016	Implementasi Pendidikan kepedudukan Jalur Format ,Non Formal dan informasi pada jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan /SSK dan Pojok Kependudukan /PJK	Jumlah SMA/SMK yang terbimbing dala pengelolaan SSK		20 SMA/SMK	Rp 65,486,850	Provinsi
Meningkat nya Kualitas Pemetaan dan Implement asi Program Bangga Kencana	2.14.02.1.0	Pemetaan Perkiraan Pengendalian	Presentase Implementasi Bangga Kencana		40.00%	Rp 223,963,300	12 Kab
	2.14.02.1.0 2.0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana ( Bangga Kencana)	Jumlah Kab/Kota yang menyusun Bangga Kencana		4 Kab/Kota	Rp 171,898,600	12 Kab
	2.14.02.1.0 2.0010	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana ( Bangga Kencana )	Jumlah Profil kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga( Bangga Kencana )		1 Dokumen	Rp 52,064,700	

Menrunya Angka Kelahiran ( TFR )	2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Menurunya Angka Kelahiran Total Pada Wanita Usia 15-49 Tahun		Rp 290,339,370	12 Kab
Meningkat nya Kesertaan Ber KB di Kab/kota disulweis Tengah	2.14.03.1.0	Pengembangan Desain Program,Pengelolaa n dan Pelaksanaan Advokasi,Komunika si,Informasi dan Edukasi ( KIE ) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( KB ) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prrsentase Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi Komunikasi informasi dan Edukasi ( KIE ) tentang KB dan Reproduksi		Rp 72,421,150	
Menurunya Jumlah PUS yang ingin Ber KB tapi tidak terlayani				2 Daerah%		
	2.14.03.1.0 1.0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Sosialisasi Kespro	1 Kab/Kota	Rp 35,745,150	12 Kab
	2.14.03.1.0 1.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan StakeHolder dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Mitra Kerja yang terjalin Kerja sama di Kab/Kota	5 Mitra kerja	Rp 36,676,000	
Meningkat nya Angka Pemakaian Kontraseps i	2.14.03.1.0	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Presentase PUS yang menggunakan Kontrasepsi Modern		Rp 217,918,220	
	2.14.03.1.0 2.0002	Peningkatan Peran serta dan Kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Kab/Kota yang mendapat sosialisasi peran serta dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan KB	3 Kab/Kota	Rp 217,918,220	
Meningkat nya Pelaksanaa n Dimensi Ketentram an,Kebahag iaan dan Kemandriri	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA ( KS )	Presentase Kab/Kota yang mengalami peningkatan Nilai Ibangga		Rp 590,218,350	

an Kab/Kota							
Meningkat nya Kualitas Pembinaan dan Pendampin ganan Program Ibangga	2.14.04.1.0	Pengelolaan Pelaksaaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melaui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Kab/Kota yang mendaptkan Pendampingan			Rp 90,218,550	
	2.14.04.1.0 1.0009	Penyediaan Kebijakan dalam Rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran ( HPK )	Jumlah Rekomemndasi Kebijakan Pengasuhan 1000 HPK	-	1 Dokumen	Rp 10,396,000	
	2.14.04.1.0 1.0016	Penumbuhan dan Penigkatan Kesadran Keluarga dalam ketertiban Perencenaan Kehidupan menuju Keluarga Berkulalitas	Jumlah Kelompok Remaja yang Mengikuti Sosialisasi Smart Parenting		1 Kelompok	Rp 24,103,500	
	2.14.04.1.0 1.0017	Pelaksanaan Fasilitasi,Pembimbin gan ,Pengembangan ,dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kelompok dan kader Tribina ,PLKB, dan Tim Pendamping Keluarga yang mengikuti sosialisasi Program		1 Kelompok	Rp 5,730,000	
	2.14.04.1.0 1.0019	Sosiialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Perwakilan Remaja yang mengikitu Sosialisasi dan pembinaan remaja Generasi Berencana	-	150 Orang	Rp 39,593,050	
	2.14.04.1.0 1.0022	Advokasi ,Sosialisasi dan promosi indeks pembangunan keluarga ( iBANGGA ) tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Advkasi Ibangga		2 Kab/Kota	Rp 10,396,000	
Menigkatny a Kapasitas Organisasi Kemasyara katan dan Kelompok Kegiatan dalam Pembangun an Kelarga	2.14.04.1.0 2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Presentase Organisasi Kemsayarakatan dan Kelompok Kegiatan yang meningkat kelompoknya	-	-	Rp 499,999,80 0	12 Kab
	2.13.04.1.0 2.0003	Sosialisasi dan Promosi tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Kelompok Masyarakat dan pengelolaan Tribina yang mendapatkan sosialisas tentang pemberdayaan Ekonomi	-	6 Kelompok	Rp 299,999,90 0	12 Kab

2.13.04.1.0 1.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengeloaan Program Ketahahan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita( BKB) Binna Keluarga Remana ( BKR) Bina Keluarga Keluarga Lansia( BKL) usaha Peningkatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengeloaan Program Ketahahan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita( BKB) Binna Keluarga Remana ( BKR) Bina Keluarga Keluarga Lansia( BKL) usaha Peningkatan	-	30 Organisas i	Rp 199,999,90 0	12 Kab
	Pendapatan Keluarga Akseptor ( UPPKA)	Pendapatan Keluarga Akseptor ( UPPKA)				

## BAB III TUJUAN, SASARAN

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan RB Nasional 2020-2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara

langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk

menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Reformasi Birokrasi Tematik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang mengamanatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu perangkat daerah pengampuh penanggulangan kemiskinan.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Tahun 2020-2024 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan KBKR melalui penguatan kemitraan.
- 2. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah khusus dan sasaran khusus.
- 3. Peningkatan kesertaan KB Pria melalui penguatan peran motivator KB Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan metode operasi pria (MOP) atau vasektomi yang kompeten di setiap kabupaten dan kota.
- 4. penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, termasuk pencegahan Pernikahan Anak, Pencegahan Stunting sejak Dini, dan pembentukan Kampung Keluarga berkualitas Serta peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- 5. Memastikan Program Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai Alokasi Anggaran yang memadai sesuai dengan kewenangan Daerah Guna memenuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana
- 6. Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Pelayanan Keluarga Berencana dengan memastikan ketersediaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, Baik dari Pemerintah maupun Swasta.

- 7. Menjamin tersedianya Alat/obat/Cara Kontrasepsi untuk menunjang Pelayanan Keluarga Berencana pada Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, Baik dari Pemerintah maupun Swasta Fasilitas
- 8. Meningkatkan Kompotensi sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana
- 9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dapat Melakukan Koordinasi dengan kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maupun Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam melakukan monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Optimalisasi Program.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tujuan Pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Provinsi Sulawesi Tengah "Meningkatnya Kualitas **Keluarga"** dengan indikator Pembangunan Tujuan "Indeks Pembangunan Keluarga" Adapun Sasaran Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai " Meningkatnya adalah Ketentraman, kebahagiaan dan kemandirian Keluarga dengan indikator "Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Keluarga".

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator serta target untuk pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No ·	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61.86
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan	Meningkatnya Ketentraman, Kebahagiaan,	- Indeks Dimensi Ketentraman	Nilai	61.50
	Keluarga dan Kesetaraan Gender	dan Kemandirian Keluarga	- Indeks Dimensi Kemandirian	Nilai	52.49
			- Indeks Dimensi Kebahagiaan	Nilai	71.60

#### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2029, bahwa visi pembangunan daerah adalah Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju " dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak dalam menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat. Lebih Sejahtera dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai.

Untuk mencapai visi dan program prioritas diatas maka di Jabarkan ke dalam 9 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu ;

- 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
- 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.
- 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
- 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
- 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
- 6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
- 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulteng dan di Luar Provinsi bertetangga.

- 8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistimatis dan Digital.
- 9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Berdasarkan RPJMD dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah menjabarkan arahan RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan mendukung misi sebagai berikut:

### Tujuan:

- 1. Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas melalui Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi guna memgendalikan angka Kelahiran, Kematian serta Angka Stunting.
- 2. Mewujudkan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi dalam Pembangunaan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 3. Terwujudnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dalam RENSTRA P2KB ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut :

- Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk Serta Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
- 2. Terlaksananya program ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- 3. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pelayanan kependudukan dan keluarga berencana.

#### **BAB IV**

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

## 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2026, disusun dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang mendukung Program Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan mendukung pencapaian Visi, Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Meningkatkan Optimalisasi Program Pelayanan Keluarga Berencana Pembangunan yang Berkelanjutan adalah 4 Program, 13 Kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp) 2025
1	2	3	4
	JUMLAH TOTAL APBD	12.003.087.643	10.503.108.140
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.691.849.973	9.677.156.720
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.420.790	45.299.190
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.420.790	45.299.190
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.982.308.613	7.967.939.454
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.003.208.613	7.003.389.454
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	929.700.000	925.950.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.400.000	38.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	315.273.200	69.555.600
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	220.718.700	49.105.600
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65.724.500	20.450.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.830.000	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.017.133.745	658.369.576
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	169.903.295	129.933.176
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	195.737.050	63.137.150
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	651.493.400	465.299.250
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.508.000	131.508.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.220.000	0
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	184.483.500	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya.	225.315.225	131.508.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.384.900	421.384.900
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	421.384.900	421.384.900
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.310.000	383.100.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.150.000	269.740.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.160.000	60.360.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	55.000.000	53.000.000
2	Program Pengendalian Penduduk	430.679.950	173.821.800
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daera Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	206.716.650	90.480.000
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	87.527.700	32.541.300
	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	53.702.100	30.050.450
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Informal pada Jenjang SLTA-MA melalui SSK dan PJK	65.486.850	27.888.300
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	223.963.300	83.341.750
	Penyusunan profil Program kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	52.064.700	63.137.800
	Pemetaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana)	171.898.600	20.203.950
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	290.339.720	252.968.320
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	72.421.150	35.050.100
	Pengembangan Strategi Operasional promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi sesuai kearifan budaya lokal	35.745.150	17.745.900
	Fasilitasi kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja dan pelaksanaan advoaksi, promosi dan KIE program Banggan Kencana	36.676.000	17.304.200

	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran		217.918.220
	serta Organisasi Kemasyarakatan		22113231223
	Tingkat Daerah Provinsi dalam	217.918.220	
	Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB		
	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama	217.918.220	217.918.220
	Organisasi Kemasyarakatan dalam	217.310.220	217.510.220
	Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan		
	Ber-KB		
4	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	590.338.450	399.161.300
	Pengelolaan pelaksanaan desain		74.015.550
	program pembangunan keluarga	90.218.550	
	melalui pembinaan dan kesejahteraan	70.210.000	
	<b>keluarga</b> Pembinaan Ketahanan dan	407.010.000	
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	487.918.900	0
	Penyediaan Kebijakan dalam rangka		10.396.000
	penyiapan pengasuhah 1000 hari	71.245.900	10.050.000
	pertama kelahiran (HPK)		
	Pengembangan dan perbanyakan materi		0
	substansi pusat informasi konseling		
	remaja (PIK R) media promosi, alat	32.000.000	
	peramainan edukatif Remaja dan sarana prasarana lainya yang dibutuhkan		
	Pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan,		5.730.000
	pengembangan, dan penguatan	5.730.000	0.7 00.000
	penyiapan pengasuhan 1000 (HPK)		
	Sosialisasi dan pembinaan Remaja		29.583.050
	tentang Generasi Berencana	208.189.700	
	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan		0
	Pelaksana pusat informasi konseling	195.513.550	
	Remaja PIK R	220102000	
	Advokasi Sosialisasi dan Promosi Indeks		10.396.000
	Pembangunan Keluarga (Ibangga)	10.396.000	
	Tingkat Provinsi dan Kab/ Kota	10.030.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran		325.145.750
	serta Organisasi Kemasyarakatan		020.140.700
	Tingkat Daerah Provinsi dalam		
	Pembangunan Keluarga Melalui	257.700.532	
	Pembinaan Ketahanan dan		
	Kesejahteraan Keluarga		
	Sosialisasi dan promosi tentang	200 000 000	86.775.450
	pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	299.999.900	
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan		199.999.900
	Organisasi Kemasyarakatan dalam		
	Pengelolaan Program Ketahanan		
	Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita	257.700.532	
	(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina	201.1100.002	
	Keluarga Lansia (BKL), Usaha		
	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan		
	Arochini (olliw) nan		

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Pembangunan Keluarga merupakan suatu Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ,Kemajuan Pembangunan Keluarga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Pembangunan keluarga ini di arahkan pada pencapaian keluarga berkualitas,berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga. Yang mana hal ini berkaitan dengan program penurunan Stunting. Jika di lihat dari hasil survei antara prevalensi stunting dan Angka Pernikahan Anak yang ada di Sulawesi Tengah, maka Dinas Pengendalia Penduduk Sulwesi Tengah berspekulasi bahwa tingginya Stunting di Sulaweis Tengah di pengaruhi oleh Faktor Penikahan Anak.

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang di tunjukan melalui ketenrtaman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.hasil dari Indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga melalui kategori Tangguh, berkembang atau Rentan.

Membangun Kesadaran tentang Pentingnya Kesehatan Reproduksi adalah Aspek penting dari Kesehatan secara keseluruhan, terutama bagi Remaja yang sedang mengalami fase perkembangan yang krusial,namun hingga saat ini,masih banyak yang menganggap tabu tentang Kesehatan Reproduksi Remaja meskipun sangat penting bagi perkembangan fisik dan emosional mereka.kesadaran tentang Kesehatan Reproduksi tidak hanya membantu remaaj membantu memahami tubuh mereka,tetapi juga berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kehidupan seksual mereka.

#### 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah artinya penting dalam mengaplikasikan berbagai sangat persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan Keluarga yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan perangkat daerah terkait dengan lebih optimal dalam menciptakan Good Governance.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. Berencana dimana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seluruh unit kerja diharapkan dapat melaksanakan Rencana Kerja dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara sistematis dan konsisten.

Renja-OPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan:

- Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan
- Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ; dan d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 organisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

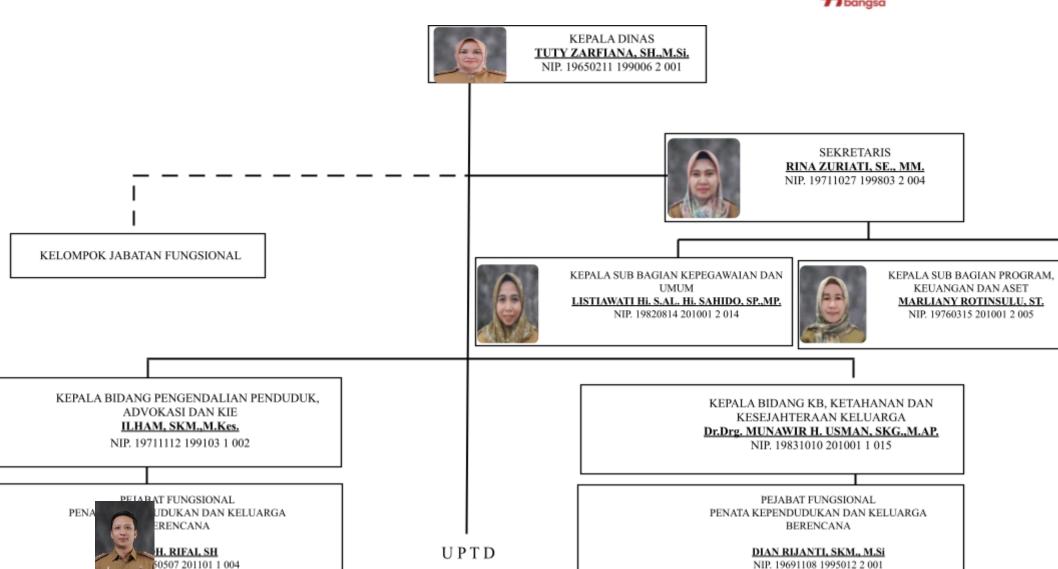
## Organisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Penanggung Jawab Umum dan Pengendali Program
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Kepala Bidang	Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan
4	Kasubag dan Kasubid	Penanggung Jawab Pelaksana Sub Kegiatan
5	Para JFU/Staf di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawes Tengah	Pelaksana Input dan Operasional Penyelenggara Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kerja



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH





#### 5.3 Rencana tindak lanjut.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja-OPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun dengan K/L/D/I maupun OPD yang membidangi fungsi lain. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun sebagai pedoman yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh aparatur sebagai pelaksana kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih memerlukan penyempurnaan- penyempurnaan lebih lanjut sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, semoga bermanfaat bagi kita semua.